

Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Usaha pada PT PLN Indonesia Power

**Adinda Saphira Rizki¹, Novitasari Novitasari^{2*}, Irma Oktiani³, Hastuti Redyanita⁴,
 Rodiana Listiawati⁵**

^{1,2,3,4,5}Politeknik Negeri Jakarta

Email : novitasari@akuntansi.pnj.ac.id

Received: 30-06-2026 Revised : 10-07-2026 Accepted : 12-07-2026 Published : 14-07-2026

Abstrak

PT PLN Indonesia Power memiliki aktivitas operasional penjualan barang dan jasa yang melibatkan berbagai transaksi keuangan, termasuk transaksi yang menimbulkan piutang usaha. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan akan ketepatan pengelolaan perlakuan akuntansi terhadap piutang usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi piutang usaha pada PT PLN Indonesia Power serta menganalisis kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi piutang usaha pada PT PLN Indonesia Power meliputi proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian piutang usaha yang didukung oleh penggunaan sistem *SAP Enterprise Resource Planning* (SAP ERP) serta monitoring dan rekonsiliasi merupakan bagian dalam penyajian yang dilakukan secara berkala untuk memastikan keakuratan saldo piutang dan kesesuaiannya dengan data pendukung. Berdasarkan hasil analisis, perlakuan akuntansi piutang usaha yang diterapkan telah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Instrumen Keuangan, PSAK No. 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dan PSAK No. 224 tentang Pengungkapan Pihak Berelasi. Dengan demikian, penerapan perlakuan akuntansi piutang usaha pada PT PLN Indonesia Power telah mendukung penyajian informasi keuangan yang akurat, andal, dan relevan bagi pengguna laporan keuangan.

Kata kunci: perlakuan akuntansi, piutang usaha, perlakuan standar akuntansi keuangan

Abstract

PT PLN Indonesia Power conducts operational activities involving the sale of goods and services, which give rise to various financial transactions, including transactions that generate trade receivables. This condition necessitates accuracy in managing the accounting treatment of trade receivables. This study aims to describe the accounting treatment of trade receivables at PT PLN Indonesia Power and to analyze its compliance with applicable accounting standards. The method employed is descriptive qualitative, utilizing observation, interviews, and documentation conducted during an internship program. The findings indicate that the accounting treatment of trade receivables at PT PLN Indonesia Power encompasses the processes of recognition, measurement, recording, and presentation, supported by the use of the SAP Enterprise Resource Planning (SAP ERP) system. Monitoring and reconciliation constitute an integral part of the presentation process, conducted periodically to ensure the accuracy of the receivables balance and its consistency with supporting data. Based on the analysis, the accounting treatment of trade receivables applied by the company has been found to comply with PSAK No. 109 on Financial Instruments, PSAK No. 201 on Presentation of Financial Statements, and PSAK No. 224 on Related Party Disclosures. Accordingly, the

implementation of the accounting treatment of trade receivables at PT PLN Indonesia Power has supported the presentation of financial information that is accurate, reliable, and relevant to users of financial statements.

Keywords: *accounting treatment, trade receivables, financial accounting standards*

Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha yang dinamis menuntut perusahaan mengelola keuangannya secara efektif, salah satunya piutang usaha yang merupakan aset lancar penting bagi likuiditas perusahaan. Piutang merupakan klaim perusahaan kepada pihak lain atas pembayaran uang, barang, atau jasa, yang hanya memerlukan satu langkah lagi untuk berubah menjadi kas (Musthafa. S.E., 2017). Piutang usaha timbul dari penjualan kredit dan memberikan hak bagi perusahaan untuk menerima pembayaran di masa mendatang (Gazali et al., 2025). Dalam sebagian besar transaksi, piutang diukur berdasarkan nilai pertukaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Kieso et al., 2019). Pengelolaan yang kurang optimal dapat meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran maupun piutang tidak tertagih, yang berdampak pada arus kas dan kualitas informasi keuangan (Ayu, 2023). Oleh karena itu, diperlukan perlakuan akuntansi piutang yang tepat agar informasi keuangan yang dihasilkan akurat, andal, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen maupun pihak berkepentingan lainnya (Zebua et al., 2022).

Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan kas di masa mendatang, piutang usaha juga menjadi salah satu indikator dalam menilai efektivitas pengelolaan modal kerja perusahaan (Ramdhani et al., 2023). Saldo piutang yang besar tanpa didukung sistem pengendalian yang memadai dapat meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan penagihan, maupun perbedaan saldo dengan pihak pelanggan (Kusuma Prakoso & Reviandani, 2022). Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan serta mengurangi keandalan informasi akuntansi yang dihasilkan (Mulyadi, 2016). Oleh sebab itu, perusahaan perlu menerapkan prosedur perlakuan akuntansi piutang yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

Perlakuan akuntansi piutang usaha meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian yang diatur dalam PSAK No. 109 tentang Instrumen Keuangan, PSAK No. 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dan PSAK No. 224 tentang Pengungkapan Pihak Berelasi guna memastikan informasi piutang disajikan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (Martani, 2012). Penerapan standar tersebut bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan (Sukanta, 2022). Dengan demikian, kepatuhan terhadap standar akuntansi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Selain penerapan standar akuntansi, efektivitas pengelolaan piutang juga didukung oleh sistem informasi akuntansi yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan. Pemanfaatan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) memungkinkan setiap transaksi piutang dicatat secara otomatis, terdokumentasi, serta dapat ditelusuri kembali sehingga mempermudah proses monitoring dan pengendalian (Satria & Fatmawati, 2023). Monitoring dan rekonsiliasi piutang yang dilakukan secara berkala juga menjadi bagian dari pengendalian internal untuk memastikan kesesuaian saldo piutang dengan dokumen pendukung serta mengidentifikasi potensi kesalahan pencatatan sejak dini (Fani et al., 2025). Pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan

memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien (Haq & Handayani, 2024).

PT PLN Indonesia Power, sebagai perusahaan pembangkitan tenaga listrik dengan volume transaksi tinggi dan melibatkan pihak berelasi maupun pihak ketiga, memerlukan sistem perlakuan akuntansi piutang yang terintegrasi. Perusahaan memanfaatkan SAP Enterprise Resource Planning (SAP ERP) untuk mengelola seluruh transaksi piutang secara terintegrasi (Ramadani Nureza Saputri et al., 2026). Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perlakuan akuntansi piutang usaha pada berbagai jenis entitas. (Sukanta, 2022) menelaah penerapan PSAK 201 tentang penyajian laporan keuangan pada CV Mekar Jaya, namun belum menyentuh aspek pengakuan dan pengukuran piutang usaha secara mendalam. (Haq & Handayani, 2024) menganalisis pengendalian intern piutang dalam meminimalkan risiko piutang tak tertagih pada PT XYZ, tetapi fokus penelitian tersebut lebih pada efektivitas pengendalian internal dibanding kesesuaian dengan standar akuntansi secara komprehensif. Sementara itu, (Situmorang & Ginting, 2024) meneliti pengelolaan piutang usaha pada perusahaan industri, namun belum mengaitkan praktik pencatatan dengan sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) maupun penomoran PSAK terbaru hasil konvergensi IFRS yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024.

Penelitian terdahulu umumnya membahas perlakuan akuntansi piutang dari aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian saja. Masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan pembahasan mengenai penggunaan SAP ERP dengan proses monitoring dan rekonsiliasi piutang sebagai bagian dari pengendalian internal, serta menganalisis kesesuaiannya dengan PSAK No. 109, PSAK No. 201, dan PSAK No. 224. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi piutang usaha pada Divisi Financial Accounting PT PLN Indonesia Power yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian, serta menganalisis kesesuaiannya dengan PSAK No. 109 tentang Instrumen Keuangan, PSAK No. 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dan PSAK No. 224 tentang Pengungkapan Pihak Berelasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada PT PLN Indonesia Power. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai penerapan perlakuan akuntansi piutang usaha yang meliputi proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian piutang usaha, serta menganalisis kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Instrumen Keuangan, PSAK No. 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dan PSAK No. 224 tentang Pengungkapan Pihak Berelasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Manager Divisi *Financial Accounting* PT PLN Indonesia Power mengenai prosedur perlakuan akuntansi piutang usaha yang diterapkan perusahaan. Selain itu, observasi dilakukan secara langsung terhadap proses pengelolaan piutang usaha pada Divisi Financial Accounting selama pelaksanaan magang yang berlangsung pada 19 Januari sampai dengan 30 April 2026, observasi tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan perlakuan akuntansi piutang. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi yang bersumber dari data operasional dan laporan keuangan internal perusahaan, berupa invoice, laporan piutang, kartu piutang, trial balance, serta data hasil pengolahan SAP Enterprise Resource Planning (SAP ERP). Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari berbagai literatur, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK), buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis dengan cara menelaah isi setiap dokumen, membandingkan keterkaitan data antara invoice, kartu piutang, laporan piutang, trial balance, dan data SAP ERP, serta mencocokkannya dengan hasil observasi, wawancara, dan ketentuan PSAK untuk memperoleh keseluruhan gambaran mengenai pelaksanaan perlakuan akuntansi piutang usaha pada PT PLN Indonesia Power.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan setiap tahapan perlakuan akuntansi piutang usaha yang diterapkan di PT PLN Indonesia Power, kemudian membandingkannya dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 109, PSAK No. 201, dan PSAK No. 224. Melalui pendekatan tersebut dapat diketahui tingkat kesesuaian antara praktik yang diterapkan perusahaan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku sehingga diperoleh gambaran mengenai penerapan perlakuan akuntansi piutang usaha pada perusahaan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumen selama pelaksanaan magang pada Divisi Financial Accounting PT PLN Indonesia Power, diketahui bahwa perlakuan akuntansi piutang usaha meliputi proses pengakuan, pencatatan, pengukuran, pengelompokan, penyajian, serta monitoring dan rekonsiliasi piutang usaha. Seluruh proses tersebut didukung oleh penggunaan SAP Enterprise Resource Planning (SAP ERP) yang mengintegrasikan transaksi piutang sejak timbulnya hak tagih hingga penyajiannya dalam laporan keuangan perusahaan.

PT PLN Indonesia Power menerapkan metode basis akrual dalam pengakuan piutang usaha. Piutang diakui ketika perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan memperoleh hak tagih yang dibuktikan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), meskipun pembayaran dari pelanggan belum diterima. Hasil wawancara dengan Manager Divisi Financial Accounting juga menunjukkan bahwa *"pengelolaan piutang usaha dimulai dari timbulnya hak tagih atas transaksi yang telah dilakukan perusahaan."* Hal tersebut menunjukkan bahwa pengakuan piutang dilakukan setelah hak kontraktual perusahaan muncul sehingga telah sesuai dengan PSAK No. 109 (2024) yang menyatakan bahwa aset keuangan diakui ketika entitas memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya.

Divisi *Financial Accounting* melakukan pencatatan seluruh transaksi piutang usaha menggunakan SAP Enterprise Resource Planning (SAP ERP). Sistem tersebut digunakan mulai dari proses pencatatan transaksi, pengelompokan piutang, monitoring saldo, hingga penyusunan laporan keuangan secara terintegrasi. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa *"PT PLN Indonesia Power menggunakan SAP Enterprise Resource Planning (SAP ERP) sebagai sistem utama dalam mendukung kegiatan operasional dan pengelolaan data keuangan perusahaan. Sistem ini digunakan untuk pencatatan transaksi, pengelolaan piutang usaha, monitoring saldo, rekonsiliasi data, serta penyusunan laporan keuangan secara terintegrasi."* Temuan ini sejalan dengan penelitian Satria dan Fatmawati (2023) yang menyatakan bahwa penerapan ERP mampu meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi melalui integrasi data dan otomatisasi proses bisnis sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan mudah ditelusuri. Selanjutnya, piutang diklasifikasikan berdasarkan *Chart of Accounts* (COA) menjadi piutang pihak berelasi dan piutang pihak ketiga sehingga memudahkan proses monitoring, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan keuangan. Piutang usaha PT PLN Indonesia Power akan diungkapkan dalam sebuah

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berikut adalah pengungkapan piutang usaha PT PLN Indonesia Power :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2025 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
5. PIUTANG USAHA			5. TRADE RECEIVABLES
	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Pihak berelasi	73,994,810	69,366,978	<i>Related parties</i>
Cadangan kerugian kredit ekspektasian			<i>Allowance for ECL</i>
Pihak berelasi	<u>(4,677)</u>	<u>(4,899)</u>	<i>Related parties</i>
Jumlah, bersih - pihak berelasi	<u>73,990,133</u>	<u>69,362,079</u>	<i>Total, net - related parties</i>
Pihak ketiga	173,725	195,303	<i>Third parties</i>
Cadangan kerugian kredit ekspektasian			<i>Allowance for ECL</i>
Pihak ketiga	<u>(36,842)</u>	<u>(42,226)</u>	<i>Third parties</i>
Jumlah, bersih - pihak ketiga	<u>136,883</u>	<u>153,077</u>	<i>Total, net - third parties</i>
Jumlah, bersih	<u>74,127,016</u>	<u>69,515,156</u>	<i>Total, net</i>

Gambar 1. Pengungkapan piutang usaha PT PLN Indonesia Power
Sumber: Laporan Keuangan PT PLN Indonesia Power

Pengungkapan piutang usaha secara terpisah antara pihak berelasi dan pihak ketiga menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan klasifikasi piutang sesuai karakteristik hubungan transaksi. Penyajian tersebut memudahkan pengguna laporan keuangan dalam mengidentifikasi komposisi piutang perusahaan sekaligus memenuhi ketentuan PSAK No. 224 mengenai pengungkapan pihak berelasi.

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2026	31 Desember/ December 31, 2025	
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
14 Kas dan setara kas	13	3.787.608.677.705	3.661.374.929.089	<i>Cash and cash equivalents</i>
Rekening bank				
15 dibatasi penggunaannya	11	-	-	<i>Restricted cash in banks</i>
16 Investasi jangka pendek	14	10.157.550.000	7.734.525.000	<i>Short-term investments</i>
17 Piutang usaha		116.340.553.025	140.901.627.594	<i>Trade receivables</i>
Pihak berelasi	15			<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	15			<i>Third parties</i>
18 Piutang dari pemerintah	16	-	-	<i>Receivables from Government</i>
19 Piutang lain-lain	17	115.466.521.069	100.035.514.946	<i>Other receivables</i>
20 Persediaan	18	5.502.797.089.886	6.165.931.547.043	<i>Inventories</i>
21 Pajak dibayar di muka	19	623.568.134.756	318.315.123.987	<i>Prepaid taxes</i>
22 Biaya dibayar di muka dan uang muka	20	198.577.020.271	301.183.193.326	<i>Prepaid expenses and advances</i>

Gambar 2. Akun piutang usaha dalam laporan posisi keuangan PT PLN Indonesia Power
Sumber: Laporan Keuangan PT PLN Indonesia Power

Penurunan saldo piutang usaha pada Maret 2026 dibandingkan Desember 2025 menunjukkan adanya perubahan saldo piutang selama periode berjalan. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya realisasi penerimaan piutang maupun penurunan transaksi kredit yang belum jatuh tempo. Dengan demikian, monitoring piutang yang dilakukan perusahaan berperan dalam menjaga kewajaran saldo piutang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Piutang Usaha juga disajikan melalui SAP ERP yang menghasilkan data analyst yang memuat seluruh mutasi piutang, seperti *accrual, realization, receipt, adjustment, reverse*, dan *reclassification* (Situmorang & Ginting, 2024). Data tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan kartu piutang untuk memantau saldo awal, mutasi, dan saldo akhir masing-masing pihak. Saldo kartu piutang kemudian dicocokkan dengan trial balance untuk memastikan kesesuaian saldo akun piutang pada buku besar. Apabila ditemukan perbedaan, dilakukan penelusuran terhadap invoice, bukti pembayaran, maupun mutasi transaksi dalam SAP ERP.

Setelah itu, perusahaan melaksanakan rekonsiliasi piutang dengan pihak terkait guna memastikan kesesuaian saldo kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa "*beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterlambatan pembayaran dari pihak terkait, perlunya monitoring piutang secara berkelanjutan untuk memastikan saldo piutang tetap akurat, serta kebutuhan rekonsiliasi data antara catatan perusahaan dan pihak terkait agar tidak terjadi perbedaan saldo.*" Oleh karena itu, PT PLN Indonesia Power melakukan monitoring melalui data *analyst*, kartu piutang, *trial balance*, serta rekonsiliasi dengan pihak terkait sebelum penyusunan laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan Haq dan Handayani (2024) yang menyatakan bahwa monitoring dan rekonsiliasi merupakan bagian penting dari pengendalian internal untuk meminimalkan risiko kesalahan pencatatan maupun piutang tidak tertagih.

Hasil akhir dari seluruh proses tersebut disajikan dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Analisis piutang usaha PT PLN Indonesia Power di bawah ini bertujuan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan dari rincian akun piutang usaha tahun 2025 dan tahun 2024 mulai dari piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga, sehingga menghasilkan piutang usaha – neto yang disajikan dalam laporan keuangan. Berikut merupakan laporan posisi keuangan PT PLN Indonesia Power khusus akun piutang usaha :

Tabel 1. Laporan posisi keuangan PT PLN Indonesia Power

PT PLN Indonesia Power			
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian			
Pada Tanggal 31 Desember 2025			
(Dinyatakan dalam miliaran Rupiah)			
ASET	2025	Catatan/Note 2024	ASSETS
		s	
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Piutang Usaha		5	Trade receiveables
Pihak Berelasi	73,990,133	69,362,079	Related parties
Pihak Ketiga	136,883	153,077	Third parties

Sumber: Laporan Keuangan PT PLN Indonesia Power

Berdasarkan Tabel 1, yang memaparkan laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT PLN Indonesia Power menunjukkan bahwa saldo piutang usaha perusahaan terdiri atas piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga. Per 31 Desember 2025, saldo piutang usaha pihak berelasi tercatat sebesar Rp73.990.133, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp69.362.079. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kenaikan nilai transaksi kredit dengan pihak berelasi yang belum diselesaikan hingga akhir periode pelaporan.

Piutang usaha pihak ketiga pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp136.883, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp153.077. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian piutang kepada pihak ketiga telah direalisasikan melalui penerimaan pembayaran atau menurunnya transaksi kredit dengan pihak ketiga pada periode berjalan.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa piutang usaha PT PLN Indonesia Power didominasi oleh piutang kepada pihak berelasi, sedangkan piutang kepada pihak ketiga memiliki proporsi yang relatif kecil. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik kegiatan operasional PT PLN Indonesia Power yang sebagian besar melakukan transaksi dengan entitas dalam lingkungan PT PLN (Persero). Piutang usaha tersebut disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian dari aset lancar sesuai dengan ketentuan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2024.PSAK No. 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan, serta diungkapkan berdasarkan klasifikasi pihak berelasi dan pihak ketiga sesuai Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2024. PSAK No. 224 tentang Pengungkapan Pihak Berelasi untuk menjaga transparansi laporan keuangan.

Tabel 2. Kesesuaian perlakuan Akuntansi Piutang Usaha PT PLN Indonesia Power dengan PSAK

Aspek		Praktik PT PLN Indonesia Power	Ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	Keterangan
1	Pengakuan Piutang Usaha	Pada PT PLN Indonesia Power diakui perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan memperoleh hak tagih yang dibuktikan melalui BAST serta dicatat sebagai <i>accrual</i> dalam SAP ERP.	Menurut PSAK 109 (2024) tentang instrumen keuangan, aset keuangan diakui ketika entitas memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari pihak lain.	Sesuai
2	Pencatatan Piutang Usaha	PT PLN Indonesia Power melakukan pencatatan piutang menggunakan SAP ERP dengan metode basis akrual melalui transaksi <i>accrual</i> , <i>realization</i> , <i>adjustment</i> ,	Menurut PSAK 201 (2024) tentang penyajian laporan keuangan, laporan keuangan sebuah entitas berdasarkan basis akrual, begitupula dengan akun piutang usaha. sehingga dampak transaksi diakui pada	Sesuai

		<i>reverse, receipt dan reclassification.</i>	saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan.	
3	Pengukuran Piutang Usaha	PT PLN Indonesia Power menentukan nilai piutang berdasarkan hasil verifikasi pekerjaan yang telah disepakati kedua belah pihak dan menjadi dasar penerbitan <i>invoice</i> .	Menurut PSAK 109 (2024) tentang instrumen keuangan, piutang usaha diukur berdasarkan nilai pengukuran awal yaitu sesuai dengan harga transaksi yang telah dikurang atau ditambah biaya transaksi yang menjadi hak entitas atau yang terkait langsung dengan perolehan piutang usaha tersebut.	Sesuai
4	Pengelompokan Piutang Usaha	Piutang pada PT PLN Indonesia Power diklasifikasikan berdasarkan <i>Chart of Accounts</i> (COA), termasuk pemisahan antara piutang pihak berelasi dan pihak nonberelasi.	Menurut PSAK 224 (2024) mengenai pengungkapan pihak berelasi, Aset keuangan perlu diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat untuk mendukung penyajian dan pelaporan keuangan.	Sesuai
5	Penyajian Piutang Usaha	Piutang usaha yang telah dicatat dan dimonitor pada PT PLN Indonesia Power disajikan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari aset lancar.	Menurut PSAK 201 (2024) tentang penyajian laporan keuangan, piutang usaha disajikan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok aset lancar.	Sesuai
6	Monitoring dan Rekonsiliasi Piutang Usaha	PT PLN Indonesia Power melakukan monitoring melalui <i>data analyst</i> , kartu piutang, <i>trial balance</i> , serta rekonsiliasi dengan	Menurut PSAK 109 (2024) tentang instrumen keuangan, mendukung keandalan informasi aset keuangan, menekankan	Sesuai

pihak terkait untuk memastikan kesesuaian saldo piutang.	pentingnya penyajian informasi keuangan harus andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
---	---

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil perbandingan pada Tabel 2, seluruh aspek perlakuan akuntansi piutang usaha telah sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku. Kesesuaian tersebut terlihat pada tahap pengakuan, pencatatan, pengukuran, pengelompokan, penyajian, hingga monitoring dan rekonsiliasi piutang. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Sukanta (2022) mengenai pentingnya penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Selain itu, penelitian ini melengkapi temuan Situmorang dan Ginting (2024) dengan menunjukkan bahwa penggunaan SAP ERP mendukung pengelolaan piutang melalui monitoring dan rekonsiliasi secara terintegrasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai perlakuan akuntansi piutang usaha pada PT PLN Indonesia Power, dapat disimpulkan bahwa PT PLN Indonesia Power melakukan pengelolaan piutang usaha yang timbul dari transaksi penjualan jasa kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga. Seluruh proses pengelolaan piutang didukung oleh sistem SAP *Enterprise Resource Planning* (SAP ERP) sehingga setiap transaksi dapat dicatat dan dipantau secara terintegrasi. Pengakuan piutang usaha pada PT PLN Indonesia Power dilakukan ketika perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan memperoleh hak tagih yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Selanjutnya piutang dicatat sebagai accrual dalam SAP ERP menggunakan basis akrual, sehingga telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109 tentang Instrumen Keuangan dan PSAK No. 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pencatatan piutang usaha dilakukan melalui SAP ERP menggunakan beberapa jenis transaksi, yaitu *accrual*, *realization*, *receipt*, *adjustment*, *reverse*, dan *reclassification*. Penggunaan sistem tersebut memudahkan perusahaan dalam melakukan pencatatan, penelusuran mutasi piutang, serta menjaga keakuratan data piutang secara berkelanjutan.

Pengukuran piutang usaha dilakukan berdasarkan nilai transaksi yang telah diverifikasi dan disepakati oleh kedua belah pihak melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai dasar penerbitan invoice. Selain itu, piutang dikelompokkan berdasarkan *Chart of Accounts* (COA), termasuk pemisahan antara piutang pihak berelasi dan pihak nonberelasi. Praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109 dan PSAK No. 224 tentang Pengungkapan Pihak Berelasi. Penyajian piutang usaha dilakukan dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian dari aset lancar. Sebelum disajikan, perusahaan melakukan monitoring melalui *data analyst*, kartu piutang, dan *trial balance*, serta rekonsiliasi dengan pihak terkait untuk memastikan kesesuaian saldo piutang. Proses tersebut mendukung penyajian informasi keuangan yang akurat, andal, dan relevan sesuai dengan PSAK No. 201, PSAK No. 109, dan PSAK No. 224.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengakuan, pencatatan, pengukuran, pengelompokan, penyajian, serta monitoring dan rekonsiliasi piutang usaha, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi piutang usaha pada PT PLN Indonesia Power telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109 tentang Instrumen Keuangan, PSAK No. 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dan PSAK No. 224 tentang Pengungkapan Pihak Berelasi.

Daftar Pustaka

- Ayu, R. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Piutang Terhadap Piutang Tak Tertagih pada PT. Abadi Sakti Mitra Mandiri. *Jurnal EMT KITA*, 7(4), 911–924. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i4.1516>
- Donald E. Kieso, J. J. W. T. D. W. (2019). *Intermediate Accounting* (17th Edition). John Wiley & Sons.
- Fani, Putranti, A., Anggraeni, F., Upn, P., Jawa, V., Tantina, T., Upn, H., Alamat, T., Rungkut Madya, J., Anyar, G., Gn, K., & Anyar, S. (2025). *Pengawasan Internal terhadap Pengelolaan Kas dan Monitoring Anggaran pada PT Yekape Surabaya*. 2(4), 303–311. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i4.5796>
- Gazali, A., Salindeho, A., Joice Pesak, P., Studi Akuntansi, P., & Tinggi Bisnis dan Manajemen Dua Sudara Bitung, S. (2025). Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Piutang Pada PT Samudera Puranabile Abadi Bitung. In *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (Vol. 4, Number 2).
- Haq, A. N., & Handayani, A. (2024). Analisis Pengendalian Intern Piutang Dalam Meminimalkan Risiko Piutang Tak Tertagih Pada Pt Xyz. In *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* (Vol. 5, Number 1).
- Kusuma Prakoso, M., & Reviandani, W. (2022). Oleh. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3).
- Martani, D. , S. S. V. , W. R. , F. A. , & T. E. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi (Edisi ke-4)*. Salemba Empat.
- Prof. Dr. H. Musthafa. S.E., M. M. (2017). *Manajemen Keuangan*. CV. ANDI OFFSET.
- Ramadani Nureza Saputri, B., Atia Tulloh, S., & Fatimah Azzahra, P. (2026). Peranan Sistem Enterprise Resources Planning (Erp) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Literatur. *Naskah Masuk: Januari*, 4(1), 3025–7972. <https://doi.org/10.61722/jiem.v4i1.8517>
- Ramdhani, Fariz, A., Setiawan, P., Sheren Aurorita, B., Reza, M., Nugroho, A., Fariz, R. A., Syifa, W. A., & Yulaeli, T. (2023). *Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Persediaan, Perputaran Piutang, Perputaran Kas terhadap Likuiditas Perusahaan. (Literature Review Manajemen Keuangan)*. 1(3), 235–250. <https://doi.org/10.47861/sammajiva.v1i2.368>
- Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2023). *Analisis Penerapan Enterprise Resource Planning Berbasis Sap Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Pt Abc*. 4. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v4i1>
- Situmorang, D. M., & Ginting, R. (2024a).) (Juni) (2024), hal (85-92) *Analisis Situasi Pengelolaan Piutang Usaha Pada Perusahaan Industri*. 13. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v13i1.81586>
- Situmorang, D. M., & Ginting, R. (2024b).) (Juni) (2024), hal (85-92) *ANALISIS SITUASI PENGELOLAAN PIUTANG USAHA PADA PERUSAHAAN INDUSTRI*. 13. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v13i1.81586>
- Sukanta, T. A. (2022). Analisis Penerapan PSAK No 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada CV. Mekar Jaya. *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah*, 1(02), 59–74. <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v1i02.138>
- Zebua, D., Bate, M., & Nikita Zebua Maria Magdalena Bate, D. (2022). Analisis Manajemen Piutang Dalam Meminimalisir Resiko Piutang Tak Tertagih Pada Pt Multi Pilar Indah Jaya (Distributor Pt Unilever Indonesia Tbk) Kota Gunungsitoli. *Jurnal EMBA*, 10(4), 1259–1268.